

## **Gerakan *Free People Movement* dan Reformasi Politik Thailand (2014 – 2020)**

**Muhamad Fikri Asy'ari<sup>1\*</sup>, Wildan Faisol<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia)

\*Korespondensi: fikriasyari92@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 08-21-2024)  
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 02-05-2025)

### **ABSTRAK**

Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang masih bergelut dengan konflik politik yang semakin intensif. Sejak kudeta tahun 2014 yang dilancarkan oleh Jenderal Prayut Chan-O-Cha, telah menjadi titik awal kolektif untuk emosi yang berkepanjangan. Kemudian, didukung oleh faktor utama dalam kecurangan sebelum dan setelah Pemilihan Umum 2019, pembubaran partai Future Forward yang progresif dan terkenal di kalangan pemuda, dan hilangnya aktivis populer Wanchalearm. Peristiwa ini akhirnya memicu gelombang protes pertama dan kedua. Rumusan masalah penelitian ini "Mengapa Free People Movement Menuntut Reformasi Politik dan Pemerintahan di Thailand pada Era Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha (2014-2020)?". Penulis menggunakan konsep Aksi Kolektif dari William Gamson dan Charles Tilly, serta Social Movement yang dibawakan oleh Sidney Tarrow dalam bukunya Power Movement, dengan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya Free People Movement (Free Youth Movement) yang dipimpin Thattap 'Ford' Ruangprapaikitseree bersama temannya, yang berhasil mengorganisir unjuk rasa untuk dapat mencapai tiga tuntutan utama yaitu berhenti mengecam pada aktivis dan masyarakat, membentuk konstitusi baru, dan membubarkan parlemen. Terhitung sekitar 350 lebih unjuk rasa dan demonstrasi besar yang berjumlah sekitar 20.000 hingga 100.000 demonstran telah dilancarkan dari Februari hingga Desember 2020 di seluruh Thailand. Memunculkan berbagai tagar, gerakan, dan dukungan dari kawasan regional. Kehadiran unjuk rasa ini pun tidak lain untuk mewujudkan demokrasi kedepannya bagi kebaikan Thailand.

**Kata Kunci:** Thailand, *Free People Movement*, *Free Youth Movement*, Pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha, Gerakan Sosial

### **ABSTRACT**

*Thailand is a country in Southeast Asia that is still struggling with political conflicts that are increasingly intensifying. Since the 2014 coup launched by General Prayut Chan-O-Cha, it has become a collective starting point for prolonged emotions. Then, supported by major factors in the fraud before and after the 2019 General Election, the dissolution of the progressive and well-known Future Forward party among youth, and the disappearance of the popular activist Wanchalearm. These events eventually triggered the first and second waves of protests. The formulation of the problem proposed in this study is "Why do the Free People Movement Demand Political and Government Reform in Thailand in the Era of Prime Minister Prayut Chan-O-Cha (2014-2020)?" To answer the questions posed, the author uses the concept of Collective Action from William Gamson and Charles Tilly, and Sidney Tarrow's Social Movement in his book Power Movement, with an explanatory qualitative research type. The result of this research is the emergence of the Free People Movement (Free Youth Movement) led by Thattap 'Ford' Ruangprapaikitseree with his friends, who succeeded in organizing demonstrations to achieve three main demands, namely to stop criticizing activists and the public, form a new constitution, and dissolve*

*parliament. More than 350 rallies and large demonstrations totaling around 20,000 to 100,000 demonstrators have been staged from February to December 2020 across Thailand. Generating hashtags, movements, and support from the region. The presence of this demonstration is nothing but to realize democracy in the future for the good of Thailand.*

*Keywords: Thailand, Free People Movement, Free Youth Movement, Government of Prime Minister Prayuth Chan-O-Cha, Social Movement*

---

Asy'ari, M.F; dan Faisol, Wildan. 2024. Gerakan *Free People Movement* dan Reformasi Politik Thailand (2014 – 2020).

---

## A. PENDAHULUAN

Thailand sebuah negara di Asia Tenggara yang masih berkuat pada konflik politik yang kian waktu semakin intensif. Politik Thailand sendiri telah didominasi oleh monarki, dewan penasihat kerajaan, birokrat, dan tentara sejak pada 1970-an (Riggs 1966; McCargo 2005). Tentara menjadi garis pertahanan pertama dalam serangkaian jaringan ini apabila mengalami ancaman. Tentara dan monarki pernah mengalami pasang surut hubungan, ditandai dengan adanya kudeta pada 24 Juni 1932 dengan nama Revolusi Siam yang dipimpin oleh Kolonel Phraya Phahon, mengakibatkan berakhirnya monarki absolut Thailand pada 26 Juni 1932 di era Raja Prajadhipok atau Rama VII (Serireongrith, 1983). Kemudian, terjalin dekat kembali pada tahun 1952 (Handley 2006, 156-157; Chaloeontiarana 2007, 51-54, 181; Chaiching 2010). Thailand di era Marsekal Darat Sarit Thanarat ditetapkan dualistik kepemimpinan, yaitu Monarki sebagai simbol bangsa yang masa lalunya gemilang, sementara Thanarat berkuasa menjadi Perdana Menteri di pemerintahan (Oo, 2014). Istana, khususnya raja, diklaim netral secara politik namun dapat mendukung pembentukan pemerintahan melalui pemilihan secara demokratis untuk melindungi status Quo dari ancaman politik kelompok anti kerajaan. Hubungan keterkaitan ini menghasilkan beberapa banyak kudeta besar yang dilakukan oleh tentara karena memiliki kepentingan untuk

menjalankan pemerintahan (Vijayat 1989, 67; Connors dan Hewison 2008; Chambers 2013). Saat kudeta berhasil dilancarkan, konstitusi sebelumnya akan diganti dengan konstitusi baru untuk memulihkan dominasi jaringan monarki. Jika di total terdapat tiga puluh lima kali kudeta dan upaya kudeta yang dilancarkan dari tahun 1911 hingga 2016, 53 tahun rezim militer mendominasi Thailand dari tahun 1932 hingga 2016 (Chambers & Waitoolkiat, 2021).

Tahun 2001, Thaksin Shinawatra berhasil memenangkan pemilu dan merebut kendali pasukan keamanan Thailand dari Prem Tinsulanonda, jenderal yang mendominasi politik bersama raja karena menjadi kepala dewan penasihat raja (Samudavanija 1997: 56). Thaksin merupakan elit politik baru yang berasal dari daerah pedesaan, khususnya Thailand Utara dan Timur Laut yang berpenduduk rural. Terlepas dari keberhasilan dalam mengkooptasi elit lama, hubungan antara Thaksin dan elit lama menjadi buruk ditandai dengan dimonopolinya media, politik dan ekonomi secara bertahap. Elit lama merupakan kalangan atas Thailand yang sebagian besar hidup di perkotaan dan beberapa kalangan atas memiliki hubungan langsung dengan monarki atau pemerintahan (Maneechote & Chia, 2020). Ditambah dengan adanya kebijakan yang mensejahterakan dan memberdayakan kelompok akar rumput, bersamaan dengan berkembangnya ekonomi yang pesat, membuat pergeseran loyalitas di akar

rumpun dari elit lama kepada partai dan kroninya Thaksin (Phongpaichit dan Baker 2008, Hewison 2010) dan Thaksin semakin populer di kalangan masyarakat rural di pedesaan.

Yingluck Shinawatra dan Partai Pheu Thai (PT) berhasil memenangkan pemilu 2011 dengan dukungan Kubu Merah. Terdapat 320 desa di kawasan Provinsi Udon Thani dan Khon Kaen sebagai pendukung Kubu Merah (Setyarini, 2011). Namun, pemerintahannya berlangsung pendek karena demonstrasi anti-pemerintah terus berkejolak hingga pada 2013, Yingluck membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum dengan cepat (Calamur, 2013). Pada 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemberhentian Yingluck, karena diklaim sebagai penyelewengan kekuasaan atas dicopotnya pejabat sekertaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri (Bangkok Post, 2014). Lalu, wakilnya Niwatthamrong Bunsongphaisan menggantikannya.

Setelah Yingluck diberhentikan, terjadi protes besar selama enam bulan hingga banyaknya korban jiwa dari unjuk rasa. Kemudian, kudeta terjadi kembali yang dilakukan oleh Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Prayuth Chan-O-Cha karena kebuntuan politik, dan menyatakan negara dalam keadaan darurat militer di bawah Undang-Undang Darurat Militer 1914 serta mengambil kekuasaan dua hari kemudian (Phoonphongphiphat & Yuda, 2014). Prayuth mengklaim Thailand berada di ambang perang saudara. (Nation Tv, 2014). Jenderal Prayuth berkuasa melalui National Council for Peace and Order (NCPO) dengan membangun kontrol militer, ekonomi dan politik. Strategi ini diyakini untuk membawa ketertiban dan efisiensi di Thailand. Namun, kenyataannya ini memfasilitasi dominasi militer. Pada 2016, pengadilan militer menguat dengan berbagai aturan yang represif, seperti penahanan pra-persidangan dan pra-sidang yang lama, melarang adanya

banding, hukuman menjadi keras, dan tidak diperbolehkannya pengamatan masyarakat. Selain itu, Junta menangkap banyak orang yang dituduh sebagai penghina monarki (ILAW, 2015). Militer juga menguasai perusahaan negara dan meningkatkan keanggotaan militer di dewan Thailand, dan memprakarsai pidato di televisi pada jumat malam oleh Prayuth dengan memelopori program nasionalistik dan reformasi pendidikan (Thongnoi, 2014).

Setelah pemilu 2019 di Thailand, militer tetap mendominasi melalui partai politik militer (Palang Pracharat) yang disinyalir terdapat pelanggaran pemilu (Chamber & Waitoolkiat, 2021). Menjadikannya pemilihan umum di Thailand hanya berbentuk demokrasi prosedural. Terdapat faktor yang kurang dan hingga tidak adanya penerapan demokrasi secara substansial, seperti kebebasan individu. Semenjak militer menguasai perpolitikan Thailand, terdapat gejolak di masyarakat yang disebabkan dengan perluasannya kekuasaan militer pada konstitusi 2017, penindasan oleh pemerintah dan ketidakadilan pada masyarakat. Dengan demikian, telah menurunkan nilai-nilai demokrasi dalam negara, mengakibatkan pada 2020 memunculkan sebuah *Free People Movement* (FPM) atas inisiatif dari mahasiswa yang berisi kelompok anti-pemerintah dan lainnya. FPM merupakan perluasan keanggotaan unjuk rasa dari *Free Youth Movement* (FYM) oleh para pemuda. Kehadiran FPM ini membuat sebuah gerakan politik baru pada pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha terhadap dorongan demokratisasi di Thailand, dengan tiga tuntutan, yaitu membuat konstitusi baru, membubarkan parlemen, dan mengakhiri ancaman terhadap aktivis maupun rakyat (Manushya Foundation, 2020).

Ketegangan pun meningkat karena dibubarkannya partai *Future Forward* yang merupakan partai oposisi oleh Mahkamah Konstitusi pada 21 Februari (Jarernpanit,

2019). Partai Future Forward merupakan partai progresif dan pemuda (McCargo, 2019). FPM pun menentang segala upaya untuk melakukan kudeta militer, dan apabila ada, diharapkan membentuk pemerintahan nasional untuk memecahkan kebuntuan politik (Bangkok Post, 2020). Dengan demikian, kebuntuan politik di Thailand dapat dilihat dari tahun sebelum – sebelumnya dimana saat naiknya junta pada 2014 atas kudeta militer yang dilakukan oleh Prayuth Chan-O-Cha. Setelah menguasai Thailand, Prayuth mengubah konstitusi sementara 2014 menjadi konstitusi 2017 sebagai stabilisasi politik negara atas kebuntuan pemerintahan saat Yingluck Shinawatra. Namun seiring waktu, pemerintahan semakin menekan rakyat, dan rakyat menjadi muak atas pemerintahan Prayuth sehingga memunculkan Free People Movement.

Oleh karena itu, topik ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dengan melahirkan pertanyaan “Bagaimana Free People Movement Menuntut Reformasi Politik dan Pemerintahan di Thailand Era Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha (2014 – 2020)?”. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: Pertama, untuk menjelaskan kepentingan Free People Movement di Thailand dalam merespon pemerintahan Junta di era Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha (2014-2020); Kedua, untuk menganalisis hubungan antara kepentingan Free People Movement dengan pemerintahan junta Thailand. Melalui pendekatan sejarah kudeta 2014 oleh Prayuth Chan-O-Cha dan terbentuknya Free People Movement sebagai akibat pemerintahan yang represif terhadap masyarakat hingga menimbulkan unjuk rasa besar di Thailand. Selain itu gerakan dan unjuk rasa ini memiliki dukungan dari kawasan regional. Sementara pada saat yang sama berkontribusi juga pada ruang lingkup kajian studi kawasan Asia Tenggara.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Sebagai negara semi demokrasi, Thailand pun seringkali mengalami unjuk rasa yang disebabkan represifnya pemerintah. Kajian dari Siwach, dkk (2018) membahas tentang munculnya sebuah kelompok protes Dao Din di Kawasan Isan oleh aktivis mahasiswa, sebagai respon dari ketidakadilan pemerintah pada sosial, lingkungan, dan hak politik. Sekaligus sebagai perlawanan terhadap pemerintah yang sering menunda pemilihan nasional.

Kajian dari Phoborisut (2019) membahas mengenai unjuk rasa nir pemimpin yang dilakukan aktivis mahasiswa Thailand, terhadap pemerintahan yang naik berkuasa oleh kudeta 2014. Salah satu aksinya dengan mengundang aktivis mahasiswa Hongkong, yaitu Joshua Wong dari Umbrella Movement. Hal ini sebagai penyemangat dan menginspirasi para pemuda Thailand. Aksi lainnya dengan memanfaatkan media sosial sebagai ruang aktivis untuk menggelar protes dan menarik atensi masyarakat dunia.

Berbeda dengan studi dari Waiwitlikhit (2020) menunjukkan perbandingan terhadap gerakan protes mahasiswa yang muncul di Thailand pada tahun 1973 dan 2020. Tahun 1973 diyakini sukses dalam menggelar unjuk rasa sebab memiliki pemimpin dan terpusat oleh National Student Center of Thailand (NTSC). Berbeda halnya pada tahun 2020 tanpa pemimpin dalam menggerakkan unjuk rasa, gerakan ini terdesentralisasi dan memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan protesnya. Namun kedua gerakan ini memiliki kesamaan, yaitu muncul disebabkan krisis ekonomi.

Ketiga kajian tersebut sejalan dengan kehadirannya Free People Movement sebagai respon dari mahasiswa yang meluas hingga masyarakat dari kalangan apapun ikut turun dalam unjuk rasa. Munculnya kepentingan Free People

Movement di Thailand pun dapat dijelaskan dengan mengadopsi aksi kolektif dari Wiliam Gamson (1992) dan Charles Tilly (1978) serta gerakan sosial Sidney Tarrow dalam buku *Power Movement* (1994). Menurut Wiliam Gamson, aksi kolektif dapat terbangun apabila terdapat suatu kondisi yang khusus dimana sekelompok orang dengan kepentingannya yang sama mengorganisir untuk bertindak dan mengejar kepentingan yang sama. Sedangkan, Charles Tilly memaknai aksi kolektif dengan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, perubahan sosial dan aksi protes-protes sosial. Selain itu, terdapat dua elemen penting, yaitu organisasi dan sumber daya, diluar dari kondisi objektif sebagai bentuk ketidakpuasan yang meluas. Sementara, Sidney Tarrow mengatakan social movement adalah tantangan kolektif oleh orang - orang yang memiliki tujuan bersama yang berdasarkan solidaritas dalam kegiatannya melalui interaksi secara terus menerus dengan para elite, lawan, dan pejabat. Social Movement menciptakan representasi daripada citra, karena gerakan sosial menciptakan aktor kolektif (demonstrasi) yang membangun identitas dalam jumlah besar melalui interaksi mereka dengan orang - orang penting lainnya (Melucci, 1988; Tilly dan Tarrow, 2006).

Aksi kolektif dan gerakan sosial relevan dengan penelitian ini karena menjelaskan aksi dalam massa yang menentang pada pemerintahan Junta militer Thailand, karena adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan menuntut adanya reformasi politik dan pemerintahan pada pemerintahan junta militer Thailand

### C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data akan berbentuk data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai referensi melalui studi pustaka.

Data-data sekunder meliputi berbagai karya ilmiah baik buku dan jurnal yang didominasi oleh topik-topik kajian Asia Tenggara, hubungan sipil dan militer dan kajian demokratisasi. Dalam menganalisa temuan penelitian dan menarik kesimpulan diperoleh dengan mengaplikasikan kerangka teoritis yang telah digunakan (Bakry, 2016).

Proses analisis dijalankan dengan menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi pemicu terjadinya kudeta militer tahun 2014 kemudian dihubungkan dengan sikap jenderal Prayuth Chan-O-Ocha yang mendirikan partai politiknya demi dapat terlibat dalam kontestasi pemilihan umum Thailand selanjutnya. Selanjutnya berfokus pada faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya partai Future Forward dan Free People Movement beserta menganalisa sepak terjang gerakan tersebut dalam mengadvokasi nilai-nilai demokrasi di Thailand selama era Prayuth Chan-O-Cha berkuasa. Termasuk didalamnya dengan mengaplikasikan teori gerakan sosial baik menurut Sidney Tarrow dan William Gamson untuk mengamati kedua gerakan tersebut.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN Awal Sebab Kudeta Militer 2014

Konflik berawal dari Thaksin Shinawatra yang tumbang saat di pengasingan oleh kudeta militer pimpinan Jenderal Prem pada 2006, setelah Thaksin berhasil dalam mengkooptasi elit lama dan mendapatkan dukungan dari kelompok akar rumput. Di sisi lain terjadi koalisi pemerintahan tanpa pemilu oleh Partai Demokrat Abhisit Vechachiwa yang dibangun dengan hubungan dewan penasihat dan perwira militer kerajaan (Rojanaphruk, 2008). Kemudian, elit lama memulihkan kekuasaannya dengan membentuk manipulasi Konstitusi 2007. Thaksin dan kelompoknya menggunakan strategi elektoral dan mengorganisir massa untuk unjuk rasa sebagai

penentang junta (Uchane, 2010). Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Thailand terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu baju merah (Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD)) merupakan pendukung Thaksin dan pro demokrasi, dan kubu baju kuning atau Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) merupakan pendukung monarki.

Kubu merah melancarkan aksi unjuk rasa untuk menentang koalisi parlemen tanpa pemilu, puncaknya terjadi pada tahun 2009 - 2010. Kubu merah ditandai sebagai "ancaman merah" yang dapat membakar kota (*phoa barn phao meung*) (Saxer, 2014). Kubu merah pun disebut sebagai kelompok miskin dan tidak berpendidikan karena melakukan vandalisme di perkotaan saat protes berlangsung, ini mengapa kubu merah disesatkan untuk mendukung Thaksin (Chairat, 2012; Saxer 2014, 28-29). Selain itu, kubu merah disematkan dengan "kerbau merah" (*kwai daeng*) yang berarti "bodoh". Thaksin pun dituduh mempromosikan republikanisme. Selanjutnya, kubu kuning umumnya direndahkan sebagai *salim* yang berarti fanatik terhadap kerajaan dan berlaga urban (Faris, 2011). Kubu kuning melancarkan unjuk rasa pada tahun 2013 - 2014 sebagai aksi balas dendam terhadap kubu merah. Awalnya pada 2011 partai politik Thaksin berubah nama menjadi *Pheu Thai* dan memenangkan elektoral. Memicu unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berdampak substansial, dan adanya usulan RUU Amnesti dari *Pheu Thai* yang dapat kembalinya Thaksin dari tempat pengasingan. Hal ini menjadi objek kemarahan masyarakat terutama bagi kalangan menengah perkotaan.

Akhir tahun 2013, munculnya Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC) yang bertujuan mengusir keluar pemerintahan *Pheu Thai* dengan melalui serangkaian aksi, seperti mobilisasi massa, protes, dan vandalisme. Suthep Thaugsuban

merupakan Sekretaris Jenderal PDRC, dimana sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat (Bangkok Post, 2013). Suthep sendiri merupakan koneksi dekat dengan Prayuth, Prawit, dan Anupong saat menjadi wakil perdana menteri periode 2008-2011 pada pemerintahan Abhisit. Suthep dan Prayuth pun sudah berkolusi untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin saat 2010 (Nauvarat, 2014). Terjadinya sejumlah unjuk rasa oleh PDRC yang menyebabkan bentrokan terhadap polisi dan pengunjuk rasa, blokade jalan, dan penjarahan gedung resmi. (Saxer 2014b, 178-179). Hasilnya, PDRC berhasil mengganggu pemilu Februari 2014 dan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu. Selain itu, tuntutan PDRC pun diikuti dengan aksi provokatif yang melibatkan kelompok bersenjata PDRC. Menjadikan Thailand diambang perang saudara, saat bentrokan antar polisi, kubu merah, dan serangan bersenjata oleh aktivis PDRC. Ini menjadi landasan untuk militer mengintervensi. Pada Maret 2014, Panglima Angkatan Darat (AD) mengubah pendirian terhadap tentara akan netral dalam kondisi krisis menjadi tidak segan akan melakukan kudeta (Bangkok Post, 1 Maret 2014).

Awal Mei, Mahkamah Konstitusi memutuskan Yingluck untuk mundur karena menyelewengkan kekuasaannya, dan digantikan oleh Niwatthamrong Boonsongpaisan. Selanjutnya, menyusul penolakan Senat untuk menunjuk seorang perdana menteri, Prayuth malah mengumumkan penetapan Undang-Undang Darurat Militer 1914. Ini diklaim agar militer dapat menghentikan kekerasan dan mendamaikan Thailand kembali (Phoonphongphiphat, 2014). Prayuth kemudian mendirikan Pusat Komando Penjaga Perdamaian (PKCC) yang menggantikan Pusat Administrasi Perdamaian dan Ketertiban (CAPO) buatan Yingluck. Pergantian ini dilakukan untuk diisi oleh tentara pro-Prayuth agar

segala rencana yang dilakukan Prayuth dapat melancarkan kudeta (Bangkok Post, 20 Mei 2014). Dilancarkannya kudeta 2014 oleh Prayuth dengan harapan mengakhiri krisis politik negara yang merembet ke berbagai sektor, setelah perundingan antar perwakilan yang tidak ada habisnya dari kelompok yang bertikai termasuk politisi *Pheu Thai* dan Demokrat (Matichon, 23 Mei 2014).

### **Naiknya Prayuth Chan-O-Cha dan NCPO**

Tepat 22 Mei malam hari, Prayuth muncul di televisi nasional untuk mengumumkan *putsch* (kudeta). Meskipun, Prayuth dan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) mulai berkuasa secara paksa dan mengumumkan akses aturan NCPO di televisi, Prayuth enggan menggunakan kata "kudeta". NCPO sendiri berisikan pimpinan Angkatan Darat (Prayuth), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), Komandor Tertinggi dan Polisi. Prawit dan Anupong menjadi pimpinan dan wakil tim penasihat junta. Saat malam itu juga, NCPO membatalkan Konstitusi 2007 kecuali pada pasal yang berhubungan dengan Raja, Prayuth pun membubarkan pemerintahan sipil dan dua hari kemudian membubarkan senat. NCPO mengambil alih kendali semua lembaga negara dan menahan banyak politisi yang mayoritas dari partai *Pheu Thai*. Junta melarang semua demonstrasi politik dan menutup segala lembaga pendidikan selama dua hari, serta melakukan jam malam pada pukul 10 malam hingga 5 pagi selama dua minggu. Selanjutnya, media tidak luput dari sasaran dimana ditempatkan nya sensor militer yang ketat dan beberapa program pun ditahan (Taylor, 22 Mei 2014).

Alih-alih militer menjaga monarki dan negara dari krisis politik. Namun, terdapat beberapa alasan informal yang sesuai dengan tujuan para pemimpin kudeta, yaitu a) memastikan ketertiban raja-raja untuk suksesi di masa depan; b)

menegaskan dominasi monarki-militer di tengah persepsi ancaman warga sipil; c) mengkonsolidasi angkatan bersenjata dan polisi oleh pemimpin junta; d) meningkatkan kepentingan korporasi militer, khususnya bagi para petinggi militer. Semenjak kudeta, NCPO bersama istana dan dewan penasihat Prem telah bekerja sama agar militer-monarki tetap dapat berdiri di negara Thailand (Chambers dan Waitoolkiat, 2016). Junta menerapkan kebijakan populis dengan nama *Pracha Rat* (Populisme Negara) untuk membangun dukungan rakyat (Audjarint, 2015). Kebijakan ini secara tersirat untuk menjaga nasionalis dan monarki. Selain itu, Prayuth memprakarsai pidato setiap Jumat malam di televisi dan radio yang disebut "Mengembalikan Kebahagiaan Kepada Rakyat". Ide ini agar Prayuth lebih dekat dengan rakyat, mengkritik rezim sebelumnya dan memuji pencapaian kediktatoran (Associated Press, 12 September 2014).

Pengadilan militer menjadi peradilan tertinggi di Thailand, sesuai dengan pemberlakuan UU Darurat Militer 1914 pada 20 Mei 2014. Dekrit militer pasca kudeta 37/2557 mengatakan bahwa semua kasus keamanan nasional dan berorientasi politik diadili pada pengadilan militer. Prosedur pengadilan ini cenderung lama, kurang transparan, dan hakim merupakan perwira militer. Kasus politik disini termasuk aturan *lese-majeste* (penghinaan pada monarki), hasutan, melanggar junta berbicara dan berkumpul di depan umum (Bangkok Post, 11 September 2015). Amandemen UU Pengadilan Militer 1955 hingga 2015 memungkinkan komandan militer untuk dapat menahan orang hingga 84 hari tanpa tuduhan apapun bahkan sebelum memulai sidang. Pada Mei 2015 pengadilan militer baru memberikan hak untuk menasihati para terdakwa sipil (Lawyers Rights Watch Canada, 2015). Pasal 112 KUHP Thailand yaitu *lese-majeste* menjadi

kepentingan monarki dan militer untuk menargetkan warga Thailand. Pasal ini berisikan siapapun yang menghina keluarga kerajaan atau bupati akan dipenjara 15 tahun (Reuters, 4 September 2015). Pengadilan *lese-majeste* dilakukan oleh pengadilan militer dengan hukuman yang diberikan lebih keras dan tidak sesuai.

Terdapat pelemahan demokrasi melalui UU Darurat Militer 1914, yaitu pasal 6 yang menyatakan sipil harus bertindak sesuai dengan otoritas militer. Pada bulan Juli 2014, NCPO menetapkan konstitusi sementara dan diberikannya amnesti kepada para pelaku kudeta yang mendukung kediktatoran, ini tercantum pada pasal 48. Junta berhak mengeluarkan segala perintah terlepas dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tercantum pada pasal 44. Lalu, pasal 47 segala tindakan junta merupakan legal, konstitusional, dan konklusif (Royal Thai Government, 1914; Royal Thai Government, July 22, 2014). Selain itu pada pasal 6, 10, 28, 30, dan 32 memperbolehkan junta untuk menunjuk anggota pada lembaga politik baru untuk mengawasi penulisan konstitusi, merancang undang-undang dan mentransisikan Thailand kepada demokrasi. Namun, konstitusi ini mirip dengan konstitusi junta sebelumnya (1959, 1971, 1977, 1991, & 2006). Konstitusi memberikan kekuasaan penuh pada junta. Adapun lembaga baru ini terdiri empat lembaga, yaitu Majelis Legislatif Nasional (NLA), Dewan Reformasi Nasional (NRC), Kabinet Prayuth dan Komite Penyusunan Konstitusi (CDC). Dimana perwira militer aktif maupun pensiunan memiliki jabatan di dalam keempat lembaga tersebut.

Pada Maret 2015, pasal 44 dalam Piagam Interim 2014 menggantikan UU Darurat Militer 1914 yang digunakan sejak kudeta, dengan memberikan kekuasaan kepada NCPO dan pejabat militer termasuk polisi di semua birokrasi. NCPO membatalkan hak demokrasi dan

membatasi kebebasan sipil (Chambers, 2021). Terdapat draf konstitusi terbaru yang dibuat oleh CDC dan telah dimodifikasi oleh NCPO pada Maret 2016. Sebelumnya, draf konstitusi telah dibuat pada September 2015 namun ditolak oleh NRC, karena memperbolehkan Komite Reformasi dan Rekonsiliasi Strategis Nasional yang berisikan 23 militer dan polisi untuk dapat mengambil alih parlemen ketika negara dalam keadaan krisis. Draft ini berujung perombakan keanggotaan CDC. Draft konstitusi terbaru mengartikan Thailand akan kembali pada 1991 yang berisikan empat cara utama, yaitu 1) draf tersebut membuat militer untuk mengabadikan pengaruh secara lima tahun pertama setelah pemilu; 2) Senat yang dipilih dari Konstitusi 1997 dan Konstitusi 2007, berubah menjadi badan yang ditunjuk dengan 244 anggota dipilih oleh NCPO dan 6 sisanya terdiri dari panglima, AD, AL, AU dan kepala polisi serta menteri pertahanan. Senat dapat memveto UU dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengajukan mosi tidak percaya pada perdana menteri; 3) tiap partai politik mengajukan tiga kandidat untuk menjadi perdana menteri, termasuk orang yang tidak dipilih, seperti junta dan tentara; 4) sistem pemilihan baru akan diterapkan, berupa 500 anggota majelis rendah dipilih melalui pembagian anggota campuran (MMA) dengan maksud melemahkan partai politik besar dan menciptakan banyak partai kecil (DW, 2016).

Diselenggarakannya referendum konstitusi kepada rakyat pada 7 Agustus 2016, yang menghasilkan total 61,4% walaupun jumlah pemilih hanya 50% (Aljazeera, 2016). Hasil ini membuat bingung pengamat di seluruh dunia dan konstitusi pun dikutuk oleh para kelompok Hak Asasi Manusia, disisi lain rakyat memilih karena rasa bosan terhadap krisis yang tak berkesudahan di Thailand (Head, 2016). Lolosnya referendum menjadi tanda pemilu akan



digelar pada Maret 2019. Pada 2017, junta menerbitkan Konstitusi 2017 sebagai pengganti Piagam Interim 2014, kehadiran konstitusi baru ini malah menurunkan demokrasi di Thailand karena mempengaruhi bentuk pemerintahan, hak dan kebebasan, dan mekanisme akuntabilitas. Junta juga memperkuat kendali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh sipil, seperti ekonomi dan administrasi daerah dengan pembentukan kebijakan-kebijakan agar mempertahankan pengaruh dari pihak militer.

Pada September 2015, NCPO mulai mengusulkan kebijakan cengkramannya. Skema *Pracharat* (*Pracha*: Rakyat & *rath*: negara) dipilih menjadi kebijakan stimulus ekonomi yang mempersatukan negara, masyarakat, dan pebisnis bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan. 24 Konglomerat besar pun telah mendatangi kemitraan *Pracharat* ini pada Desember 2015. Menurut Kongkirati dan Kanchoochat (2018, hal. 294 - 295) skema ini setelah dua tahun diluncurkan masih berbentuk *ad hoc* dan sembarangan, tanpa ada implementasi nyata (Nethipo, 2021). Oktober 2017, proyek populis diluncurkan bernama *Thongfah Pracharath* (*thongha* berarti bendera biru). Proyek ini berupa pembagian kartu kesejahteraan (*bat khonchon* atau kartu fakir miskin) kepada masyarakat terdaftar yang berpenghasilan rendah. Untuk mengontrol pemerintah daerah, NCPO membentuk *Damrong Dharma Centre* (pusat perlindungan kebenaran) di bawah Departemen Perindustrian. Bertugas untuk menerima pengaduan sipil, melalui perintah NCPO 96/2014 junta meningkatkan anggaran pada *Damrong* untuk memperkuat kontrol pemerintah daerah. Selain itu, junta melalui perintah No. 22/2016 secara permanen menetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengontrol pemerintah daerah agar meningkatkan efektivitas dan

mendistribusi sumber daya kepada masyarakat lokal (Grichawat, 2014; Kamuansipl & Draper, 2016).

### **Pemilihan Umum 2019: Problematis dan Demokrasi Prosedural**

Sebelum Pemilu 2019 terjadi, junta sering kali mengumumkan tanggal pemilu. Akan tetapi, semuanya sering ditunda (pada Oktober 2015, 2016, 2017, November 2018, & 24 Februari 2019). Adanya beragam alasan penundaan, seperti pemerintah tidak mengeluarkan dekrit kerajaan membuat KPU tidak dapat melakukan Pemilu, bentroknnya pemilu dengan persiapan penobatan raja Maha Vajiralongkorn, dan masalah keamanan atas kekhawatiran polarisasi di masyarakat yang berujung kekerasan. Pada 2018, munculnya partai baru yang kontroversial dan mengklaim sebagai partai politik sipil-militer, bernama *Palang Pracharath* (Partai Kekuatan Negara Rakyat). Partai ini didirikan oleh Chuan Chuchan dan Suchart Jantarachotikul yang merupakan pensiunan kolonel tentara. Partai ini memiliki kedekatan dengan NCPO dan Prayuth membuat partai ini masuk ke dalam pro-junta atau pro-Prayuth (Charuvastra, 2018). Prayuth pun menjadikan *Palang Pracharath* sebagai kendaraan politiknya. Selain itu, partai ini memiliki dukungan dari kelompok *Sam Mitr* (Tiga Teman/Sekutu) untuk memobilisasi massa, yang beranggotakan mantan menteri dari kabinet Thaksin, yaitu Somsak Thepsuthin, Suriya Jungrungrangkit, dan Somkid Jatusripitak.

Disisi lain, terdapat pembentukan sebuah aliansi partai - partai anti-militer dimana hal ini telah mendorong peluncuran partai *Future Forward* pada Maret 2018, oleh Thanathorn Juangroongruangkit. Partai ini menjadi partai yang progresif dan menjadi pesaing utama terhadap partai pro-militer dalam pemilu, karena dapat menarik pemilih muda. Junta pun tidak tinggal diam, dimana akan merencanakan pembentukan

sebuah partai yang besar dan merekrut para kandidat pemilu melalui jaringan penganalisa handal dan memberi insentif untuk berganti partai. Menjadi rahasia umum, dimana *Palang Pracharat* didukung lembaga negara dan pejabat lokal, serta berkampanye berdasarkan patronase junta dalam kebijakan '*Pracharat*', dengan dijanjikan dana untuk melanjutkan dan memperluas. Jenderal Prayuth Chan-O-Cha pun berencana untuk dicalonkan kembali menjadi perdana menteri oleh *Palang Pracharat*, melalui Senat yang ditunjuk, menarik para partai kecil dan menengah untuk bergabung pada koalisi junta.

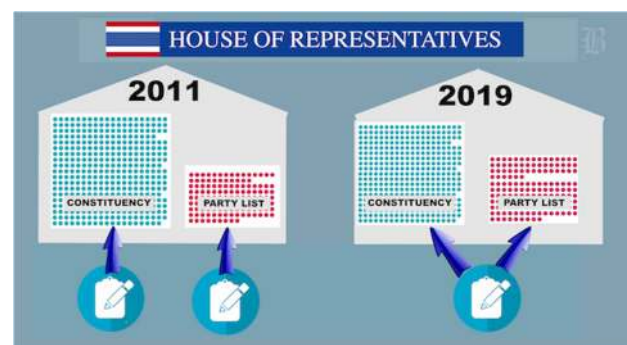
Menjelang pemilu 2019, terjadi peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan Thailand. Dimana, pada 8 Februari 2019 *Thai Raksa Chart* mengumumkan calon kandidat perdana menteri yang masih memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, yaitu putri Ubolratana Mahidol. Merupakan anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan kakak dari Raja Vajiralongkorn (Rama X) yang berkuasa. Putri Ubolratana bersikeras karena mengklaim bahwa dari kalangan rakyat biasa, karena telah menikahi pria Amerika dan telah kehilangan status kerajaannya. Di hari yang sama pada malam hari, euforia kemarahan dari kubu merah dan kubu kuning sirna karena Raja Vajiralongkorn mengeluarkan proklamasi kerajaan yang belum pernah terajadi. Menyatakan bahwa pencalonan saudara perempuannya tidak pantas karena masih memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan dan bekerja di bawah nama monarki dinasti *Chakri*. Dengan demikian, itu menyalahi aturan tradisi, norma, dan budaya kerajaan yang tidak boleh terlibat politik (BBC.com, 2019).

Pada pemilu 2019, terdapat perubahan sistem pemungutan suara. Parlemen Thailand sendiri memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (*Saphaputhan Ratsadon*) dan Senat

(*Wuthisapha*) dengan masa jabatan empat tahun bagi DPR dan lima tahun bagi Senat. Semenjak 2001, Thailand menggunakan sistem *Mixed Member Majoritarian* (MMM), dimana pemilih menandai dua surat suara, yaitu satu untuk daerah pemilihan dan satu untuk daftar partai nasional, dengan 375 kursi daerah pemilihan dan 125 kursi daftar partai yang dipilih melalui perwakilan secara proporsional (Bangkok Pundit, 2016).

Sistem *Multi-Member Apportionment* (MMA) merupakan sistem terbaru yang termaktub dalam Konstitusi 2017. Di bawah sistem MMA, Thailand akan memilih 350 kursi konstituen dan 150 kursi daftar partai (Pasal 78). Pemilih akan memberikan satu suara untuk satu kandidat beserta dengan partai kandidat (Pasal 80). Suara tersebut dihitung sebagai suara kandidat dan daftar partai kandidat untuk mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah total suara yang diterima oleh partai secara nasional melalui pemungutan suara ini akan menentukan kursi yang berhak diperoleh partai (Pasal 86). Daftar kursi partai di Parlemen akan ditambahkan sebagai kursi konstituen partai sampai jumlahnya tercapai (Pasal 86) (Allen Hicken & Bangkok Pundit, 2019). Dengan demikian, sistem MMA untuk mengurangi kekangan dari dominasi partai besar dan mendukung partai kecil dan sedang. Perbedaan MMM dan MMA agar dapat mudah dipahami dapat dilihat gambar di bawah ini.

**Gambar 1. Perbedaan MMM dan MMA**



Sumber: Bangkok Post, 2019

Selain itu, adanya penghapusan persyaratan perdana menteri yang dipilih dari anggota DPR yang terpilih. Konstitusi 2017, memberikan pilihan terhadap para partai untuk menentukan calon perdana menteri hingga tiga kandidat. Perdana menteri akan dipilih melalui penggabungan Majelis Nasional (750 anggota) mencakup 250 anggota Senat yang ditunjuk dan 500 anggota dari DPR (Kendall, 2019). Dalam sistem baru ini, akan memudahkan Prayuth untuk melanggengkan kekuasaannya di puncak jabatan perdana menteri. Dimana 250 Senat akan memilih Prayuth dan hanya membutuhkan 126 dari 500 anggota DPR untuk menang kembali. Ini menandakan pemilihan perdana menteri tidak dapat disebut pemilihan yang demokratis dan sebagai pencegahan terhadap *Pheu Thai* untuk berkuasa di parlemen. Kemudian, daerah pemilihan pun ikut dirubah mengikuti jumlah kursi, dari 375 kursi menjadi 350 kursi. Dalam hal ini, KPU diberikan kewenangan untuk menyusun batas daerah pemilihan dan telah merancang peta daerah. Namun, pada 17 November 2018 Prayuth mengintervensi KPU untuk merancang kembali batas daerah pemilihan. Intervensi ini menimbulkan kemarahan dari *Pheu Thai* dan Demokrasi serta pengawas pemilu independen, yaitu Open Forum for Democracy Foundation (Bangkok Post, 2018). Intervensi ini mengindikasikan terjadinya persengkongkolan (*Gerrymandering*) yang menguntungkan *Palang Pracharat* dan partai junta lainnya.

Pemilu ini diikuti oleh 77 partai dan bersaing pada 24 Maret 2019, adapun beberapa kandidat perdana menteri yang diusung, seperti Prayuth Chan-O-Cha dari partai *Palang Pracharath*, Sudarat Keyuraphan dari partai *Pheu Thai*, Abhisit Vejjajiva dari partai Demokrat, Anutin Charnvirakul dari partai *Bhumjai Thai* dan

Thanathorn Juangroongruangkit dari partai *Future Forward* (Associated Press, 2019). Pemilu ini diikuti hingga 74,69 persen dengan minimal umur 18 tahun. KPU Thailand menolak mengumumkan pada 8 Mei, karena adanya penobatan Raja Vajiralongkorn pada 4 – 6 Mei. KPU muncul dengan metode penghitungan alokasi yang berbeda, dimana awalnya aliansi pro demokrasi mengamankan 255 kursi berubah menjadi 245 kursi. Dimana pengurangan ini diberikan pada 12 partai kecil (Sattaburuth & Bangprapa, 2019). KPU beralasan dalam metode perhitungan baru mengurangi ambang batas menjadi 35.000 suara dengan alasan setiap suara sangat berarti (Rojanaphruk, 2019).

Para partai aliansi pro demokrasi memiliki banyak hambatan dalam pemilu 2019, seperti pemimpin partai Demokrat Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri, partai *Bhumjai Thai* dan Demokrat bergabung dengan aliansi militer, pemimpin *Future Forward* terkena serangkaian hukuman dan terancam hak politiknya. Pada akhirnya, Prayuth dapat kembali menjadi perdana menteri setelah lima tahun berkuasa jalur kudeta 2014. Prayuth sendiri dapat mengamankan 375 suara dari 750 anggota parlemen (Ellis-Petersen, 2019; Deutshce Welle, 2019). Kabinet kembali diisi oleh NCPO dan susunan menteri dari campuran para jenderal tua dan politisi yang patuh terhadap Prayuth (McCargo, 2019).

### **Gelombang Pertama Demonstrasi 2020: Future Forward**

Mahkamah Konstitusi memutuskan *Future Forward* untuk bubar pada 24 Februari 2020. Pengadilan juga melarang 16 orang eksekutif partai untuk berpartisipasi pada politik selama 10 tahun. Menurut Stratis Times of Singapore, *Future Forward* telah terjerat lebih dari 25 kasus hukum semenjak debut dalam pemilu 2019. Salah satunya, seperti *Future Forward* menerima 191,2 juta Baht dari sumber yang tidak sah. Dalam pasal 66 UU

Partai Politik, disebutkan bahwa sumbangan dibatasi hingga 10 juta baht per donor per tahunnya (Bangkok Post, 2020; Gunia, 2020; Kurlantzick, 2020). Dalam pemilu 2019, *Future Forward* berhasil meraup 6,3 juta suara dan menjadi peringkat ketiga dalam menduduki kursi di parlemen. Di sisi lain, pendukung kaum royalis (baju kuning) menuduh *Future Forward* sebagai pendukung republikanisme (Sombatpoonsiri, 2021). Saat hari dibubarkan, telah memicu gelombang protes pertama, tagar *#Save the new future* di Twitter menjadi trending nomer satu di Thailand dan memiliki 1 juta *tweet*. Unjuk rasa ini dilakukan oleh mahasiswa di lebih dari 50 universitas. Dengan menggunakan tagar-tagar dan tulisan-tulisan, seperti 1) *#Pillars will not be broken anymore* (#เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป) yang berartikan tiang tidak akan dipatahkan lagi, sesuai dengan *tagline* Universitas Chulalongkorn sebagai “pilar tanah”; 2) *#Giam Udom doesn't bow to dictatorship* (#กียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ) ‘Giam Udom’ adalah ‘Triam Udom’, tagar ini berasal dari sekolah Triam Udom Suksa; (3) *#SWU generation of change* (#มศวคนรุ่นเปลี่ยน) dari Universitas Srinakharinwirot (Sirithamphaiboon, 2020).

Beberapa universitas juga menyinggung kepada kaum konservatif pro-militer dan pro-monarki yang dijuluki dengan *Sarim* (*Salim/Slim*), merujuk kepada makanan penutup es serut dan diisi dengan mie berwarna-warni yang disajikan dengan santan dan sirup. Beberapa contoh dalam penggunaan kata ini oleh universitas, yaitu (1) *#KU is not coconut milk dessert* (#KUไม่ใช่ขนมหวานราดกะทิ) dari Universitas Kasetsart (KU); (2) *#KKU is sorry for being late, (our) posts were deleted by salim* dari Universitas Khon

Khaen; (3) *#Salaya stops eating multi-coloured dessert (sarim)* (#ศาลายางดกินของหวานหลายสี) dari Universitas Mahidol yang berlokasi di Salaya; (4) *#Phra Chom Klao loves eating (drinking) liquors but not salim* dari Institut Teknologi Raja Mongkut Ladkrabang (Sirithamphaiboon, 2020). Hal yang disorot dalam unjuk rasa ini dimana lembaga pendidikan tidak tunduk dalam UU Majelis Umum B.E 2558 tahun 2015 pasal 3, yaitu pertemuan untuk upacara dan kegiatan 1) kerajaan dan pemerintah; 2) keagamaan menurut tradisi atau budaya setempat; 3) hiburan, mempromosikan pariwisata atau kegiatan lainnya sebagai keuntungan komersial; 4) lembaga pendidikan; 5) UU dalam bentuk majelis, rapat, seminar akademik, atau menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan akademik; 6) keadaan darurat atau darurat militer setelah diumumkan, dan rapat umum yang diadakan untuk kepentingan kampanye dalam waktu pemilu (Sirithamphaiboon, 2020).

Nyatanya unjuk rasa ini menjadi pemantik dan bak lilin api yang membesar. Namun, unjuk rasa di berbagai universitas ini sempat tertunda karena merebaknya Covid-19 di seluruh Thailand. Prayuth pun mengeluarkan keputusan darurat nasional sebagai tanggapan dari Covid-19, melihat total 934 orang telah terjangkit Covid-19 (Tat News, 2020). Keputusan ini berdasarkan pada pasal 9 keputusan tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat B.E 2548 tahun 2005 No.7. Selain itu, dalam keputusan darurat peraturan No.1 yang dikeluarkan pada 26 Maret 2020, dalam pasal 5 melanggar untuk berkumpul di tempat umum. Adapun hukumannya dipenjara kurang dari dua tahun dan denda kurang dari 40.000 baht. Selama masa ini, masyarakat tidak dapat menyelenggarakan kegiatan politik dan hampir tidak ada aktivitas yang dilakukan, karena takut akan bahaya Covid-19 yang

belum diketahui (Ilaw, 2022).

Alih-alih menjaga kondisi negara dari Covid-19, pemerintah Thailand malah memanfaatkan kondisi Covid-19 dengan melalui keputusan darurat untuk menggertak gerakan politik yang mengkritisi dan menentang pemerintah. Kebebasan berkespresi dan media pun dibatasi secara berlebihan, berdasarkan pada pelarangan penyebaran informasi mengenai Covid-19 dan memicu kekhawatiran yang menyebabkan ketakutan di masyarakat, serta penyimpangan informasi yang disengaja mengakibatkan kesalahpahaman di masyarakat yang mempengaruhi kondisi perdamaian dan ketertiban negara. Pakar HAM PBB mengatakan deklarasi darurat Covid-19 tidak boleh menargetkan suatu kelompok minoritas atau individu tertentu. Serta tidak berlindung pada kedok melindungi kesehatan masyarakat, dimana penerapannya dengan represif atau meredam perbedaan pendapat (Human Rights Watch, 27 Mei 2020).

Aktivis pro-demokrasi Thailand yang populer dan bersuara lantang dalam mengkritik militer dan monarki Thailand, yaitu Wanchalearm Satsakit (37) dilaporkan hilang di tempat pengasingannya di Kondominium Mekong Gardens di Distrik Chroy Changva, Phnom Penh, Kamboja pada 4 Juni 2020. Wanchalearm sendiri telah di tempat pengasingan semenjak kudeta 2014. Menurut Pavin Chachavalpongpun (50) akademisi yang melarikan diri sejak 2014 ke Jepang, Wanchalearm hanya mengkritik kepada NCPO dan tidak langsung kepada monarki. Tidak hanya membicarakan politik saja, Wanchalearm pun memfokuskan pada isu-isu sosial lainnya, seperti LGBT dan pendidikan seks (Goldberg dkk, 2021). Sebelumnya, pada 25 Juni 2018 Divisi Penindasan Kejahatan Teknologi dari Kepolisian Kerajaan Thailand telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Wanchalearm dengan tuduhan dia

melanggar UU Kejahatan Digital, dimana dia mengkritisi melalui tulisan-tulisannya di halaman *facebook* miliknya dan polisi berjanji akan membawa kembali ke Thailand (Wright & Praithongyaem, 2020; Goldberg dkk, 2021).

Kehilangannya memicu penekanan dari berbagai lembaga, kelompok, maupun individu kepada pemerintah Thailand dan Kamboja untuk mencari Wanchalearm. Persatuan pelajar Thailand mengadakan unjuk rasa di tengah kawasan bisnis Bangkok. Dua hari kemudian, *Democracy Restoration Group* dan *Popular Student Network for Democracy* mengadakan unjuk rasa hal yang sama dan ditempat yang sama. Seminggu setelah itu, para aktivis pro-demokrasi pergi ke kedutaan Kamboja di Bangkok untuk mengajukan petisi penyelidikan terhadap keberadaan Wanchalearm. Pada 7 Juni 2020, terdapat protes melalui poster kuning yang memperlihatkan aktivis demokrasi "telah diculik oleh negara". Protes ini dibuat oleh *Spring Movement* dan aksi ini sebagai tanggapan atas hilangnya liputan Wanchalearm di media arus utama Thailand. Tagar-tagar seperti *#Thaicantbreathe*, *#saveWanchalearm*, *#abolishArticle112* bermunculan di media sosial ikut meramaikan demonstrasi. Nyatanya, gerakan keadilan untuk Wanchalearm menjadi titik awal protes yang lebih besar (gelombang protes kedua) kedepannya menjadikan guncangan politik di Thailand. (Goldberg dkk, 2021)

### **Gelombang Kedua Demonstrasi 2020: *Free People Movement***

Covid-19 yang sudah tidak diperhatikan oleh masyarakat dan kembalinya kegiatan politik yang bebas. Meletusnya unjuk rasa jalanan di Monumen Demokrasi di Bangkok, unjuk rasa ini menandakan bermulainya gelombang protes kedua yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas. *Free Youth Movement* (FYM)

(*Yaowachon plod-aek*) mengorganisir demonstrasi besar ini, menjadikan unjuk rasa terbesar setelah kudeta 2014 di Thailand. FYM yang dipimpin oleh Thattehp "Ford" Ruangprapaikitseree menuntut tiga tuntutan utama, yaitu membubarkan parlemen, mengakhiri ancaman terhadap aktivis maupun rakyat, dan membuat konstitusi baru. Selain itu, Selain itu, Thattehp mengkonfirmasi bahwasanya gerakan ini tidak bermaksud untuk melecehkan pada monarki atau menggulingkan Prayuth, namun hanya ingin mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah sebab menegakkan konstitusi 2017 (Mgr Online, 2020).

Setelah kejadian tersebut, unjuk rasa terus merebak ke seluruh Thailand, seperti unjuk rasa yang diadakan di halaman Universitas Mahasarakham oleh Koalisi Mahasiswa MSU untuk Demokrasi dengan 4 tuntutan, yaitu pembubaran DPR, mengakhiri para senator, menyelenggarakan pemilu UUD 1997, dan merancang UUD baru. Kemudian, kelompok aktivis LGBT *Seri Thoey (Free Thoey)* berdemonstrasi pada 25 Juli di Monumen Demokrasi dengan menyerukan untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis, diluar dari tiga tuntutan. Terhitung dari 19 Juli - 2 Agustus 2020, demonstrasi diselenggarakan di lebih dari 20 provinsi di Thailand (Coconut Bangkok, 2020; Thairath.co.th, 2020; The Bangkok Insight, 2020; Bangkok Post, 2020).

Meletusnya kembali gerakan unjuk rasa pada 3 Agustus 2020, dengan menggabungkan dua gerakan yaitu, *Free People Movement (Pracachon plod-aek)* dan Kelompok Universitas Thammasat untuk Demonstrasi (*Thammasat lae karn chumnum*). Unjuk rasa kali ini mengarah kepada monarki yang merupakan institusi suci yang tidak boleh dikritik karena memiliki hukum *lese majeste* yang melindunginya. Unjuk rasa menuntut reformasi monarki yang diduduki oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Unjuk rasa

yang dilakukan pada 10 Agustus 2020 di Universitas Thammasat oleh Front Persatuan Thammasat dan kelompok demonstrasi, mengeluarkan 10 tuntutan reformasi monarki (Prachatai, 2020). Dua peristiwa tersebut telah memicu unjuk rasa yang berlanjut hingga Desember 2020, terhitung sekitar 350 unjuk rasa meletus di seluruh Thailand dari Juli - Desember 2020, dengan jumlah pengunjuk rasa terbesar diantara 20.000 hingga 100.000 pengunjuk rasa. Setelah enam bulan berjuang pada akhirnya gerakan unjuk rasa ini mereda di penghujung tahun dengan tuntutan utama yang tidak dipenuhi oleh pemerintah Thailand. Disisi lain, meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 yang menandakan Thailand masuk pada gelombang kedua Covid-19. Prayuth mengeluarkan Peraturan No.15 tentang pelarangan pertemuan di tempat umum. Para pemimpin protes mengatakan bahwa mereka sedang "beristirahat" dan akan berlanjut pada 2021, karena Prayuth mengeluarkan peraturan tersebut (Phoonphonghipat & Yuda, 2020; Ilaw, 2021).

Nyatanya unjuk rasa ini bak ledakan bintang yang terus berceceran dan membentuk bintang baru, dalam hal ini unjuk rasa yang bermunculan. Merupakan strategi yang dipicu oleh Tatthehp dalam memimpin FYM pada 18 Juli 2020. Menjadikan unjuk rasa yang berkesinambungan secara alami tanpa pemimpin, menandakan kolektif emosi seluruh mahasiswa dan masyarakat atas kegagalan pemerintah Thailand (Mgr Online, 2020). *Free Youth Movement (FYM)* dan *Free People Movement (FPM)* merupakan gerakan yang dipimpin oleh Tatthehp Ruangprapaikitseree bersama Panumas 'James' Singpro dan beberapa teman lainnya. Gerakan ini dibentuk sebagai suara generasi muda dalam menyuarakan beberapa permasalahan, seperti kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) dengan memastikan panggung

politik juga dapat diisi oleh generasi muda. Karena keberhasilannya unjuk rasa pada 18 Juli 2020, dibutuhkannya perluasan gerakan pada masyarakat umum Thailand. Dengan demikian, dicetuskannya pembentukan FPM sebagai gerakan yang memimpin pro-demokrasi yang layak dan inklusif untuk mencapai tiga tuntutan utama. Singkatnya, FPM beriringan dengan FYM (Manushya Foundation, 2020).

Adapun tiga tuntutan utamanya, yaitu 1) pemerintah perlu berhenti dalam mengecam para oposisi dan aktivis. Sudah 6 tahun sejak kudeta 2014 hingga setelah pemilu 2019, masih terjadinya pengecaman, seperti penyiksaan dan penghilangan secara paksa, pengawasan terus-menerus, menggrebek rumah para oposisi, melecehkan orang tua aktivis, menyalahgunakan UU (tuduhan penghasutan dan keputusan darurat), dan membuat tuduhan palsu pada aktivis; 2) menyerukan konstitusi baru yang benar-benar dari rakyat dan membentuk majelis nasional melalui pemilu bebas dan adil serta melibatkan partisipasi warga; 3) menyerukan pembubaran parlemen atas hukum demokratis dan adil. Terlepas dari tiga tuntutan utama, FPM memiliki dua sikap yang tidak akan berkompromi pada pemerintah apabila dibelakangnya terdapat militer, yaitu tidak menerima dan tidak mendukung terjadinya kudeta lagi. Selain itu, negara harus berbentuk demokrasi konstitusional. Dimana, monarki menjalankan otoritasnya sesuai dengan konstitusi (Manushya Foundation, 2020).

Selain itu, unjuk rasa 2020 ini didukung oleh tagar-tagar di sosial media salah satunya melalui *Twitter*. Adapun salah satunya, seperti *#TagYourFriendsToJoinMob* untuk menarik masyarakat untuk ikut unjuk rasa dan menggalang dana, dan *#WhatsHappeningInThailand* untuk menarik perhatian internasional. Kemudian, adopsi gerakan tangan “3 jari”

dari film *Hunger Games* yang digunakan pengunjung rasa sebagai simbol melawan penguasa totaliter yang memiliki hak istimewa dan dilindungi oleh militer (Thaiger, 2020). Kawasan regional ikut mendukung berlangsungnya unjuk rasa ini, Thailand bersama Taiwan, Hongkong, India dan Myanmar menjadi bagian dari *#MilkTeaAlliance*. Nama alinasi diambil dari minuman teh susu yang populer di negara-negara tersebut. *#MilkTeaAlliance* merupakan gerakan *online* dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di lima negara. Menurut Thatthep aliansi ini juga merupakan wujud dari nilai demokrasi yang universal (Barron, 2020; Sombatpoonsiri, 2021). Pada laporan The Economist Intelligence Unit indeks demokrasi di Thailand mengalami penurunan, dimana pada 2019 dan 2020 Thailand berada di peringkat 68 dan 73 dari 167 negara. Sehingga dapat disebut sebagai kategori negara dengan demokrasi yang cacat (Khidhir, 2020; Thai Pbs World, 2020).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya kemunculan *Free People Movement (Free Youth Movement)* dilihat dari peristiwa panjang perpolitikan Thailand pada kudeta 2014 yang dilakukan oleh Jenderal Prayuth Chan-O-Cha. Hal ini disebabkan untuk menstabilkan perpolitikan dari kebuntuan politik oleh Shinawatra bersaudara dan partai politiknya. Namun kondisi tidak serta merta membaik, malah kebijakan junta memperkuat cengkraman kekuasaan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. Kemunculan dua gerakan *Free Youth Movement* dan *Free People Movement* ini merupakan hasil tindakan dari perkembangan emosi secara kolektif yang dipupuk sejak lama. FPM menjadi perluasan cakupan massa yang tidak hanya diikuti oleh generasi muda saja, melainkan dari segala kalangan pada

masyarakat umum agar dapat tercapainya tiga tuntutan utama, yaitu membubarkan parlemen, membuat konstitusi baru, dan menghentikan ancaman kepada rakyat dan aktivis. Selain faktor masyarakat yang antusias terhadap penentangan kepada pemerintah, teknologi (media sosial), kekuatan regional dan gerakan tangan ikut mewarnai proses kegiatan unjuk rasa ini. Semata – mata untuk mencari dukungan terhadap tuntutan unjuk rasa baik dari dalam negara maupun luar negara.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Bagian Buku

- Bakry, U.S. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chaiching, Nattapoll. 2010. "Monarchy and the Royalist Movement in Modern Thai Politics, 1932-1957" dalam *Saying the Unsayable: Monarchy and Democracy in Thailand*. Edit oleh Soren Ivarsson and Lotte Isager, 146-178. Copenhagen: NIAS.
- Chairat, Charoensin-o-larn. 2012. "A New Politics of Desire and Disintegration in Thailand." dalam *Bangkok May 2010: A Perspective on Divided Thailand*. Edit oleh Michael J. Montesano, Pavin Chachavalpongpun, and Aekapol Chongvilaivan, 87-96. Chiang Mai: Silkworm.
- Chaloemtiarana, Thak. 2007. *Thailand: The Politics of Despotic Paternalism*. New York: Cornell Southeast Asia Program
- Chambers, Paul. 2013. "A Short History of Military Influence in Thailand," in: Chambers, P (ed.): *Knights of the Realm: Thailand's Military and Police, Then and Now*. Bangkok: White Lotus Press.
- Creswell, John. W. 2013. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches". California: SAGE Publications.
- Gamson, Wiliam. A. (1992). "The social psychology of collective action". dalam *Frontiers in social movement theory* (p. 53-76). Edit oleh A. D. Morris & C. M. Mueller. Yale University Press.
- Handley, Paul. M. 2006. *The King Never Smiles: A Biography of Thailand's Bhumipol Aduljadej*. New Haven: Yale University Press
- Kristian, I., & Rochaeni, A. (2022). STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG ELEKTRONIK. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (2), 207-216.
- Riggs, Fred W. 1966. *Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity*. Honolulu: EastWest Center Press
- Samudavanija, Chai-anan. 1997. *The Military, Bureaucracy, and Globalization Dalam Hewison, Kevin: Political Change in Thailand*. London: Routledge.
- Saxer, Martin. 2014. *In the Vertigo of Change: How to Resolve Thailand's Transformation Crisis*. Bangkok: Open Worlds
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Subagy, A., Ip, S., Kristian, I., Ip, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Tarrow, Sidney. 1994. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Boston: Addison-Wesley



Tilly, Charles & Tarrow, Sidney. 2006. *Contentious Politics*. Oxford: OUP USA.

### Artikel Jurnal

Chambers, Paul & Waitoolkiat, Napisa. 2021. "Thailand's Security sector "Deform" and "Reform"". *PRIF: Working Papers* No.52

\_\_\_\_\_. 2019. Thailand's Thwarted Democratization. *Asia Affairs: An American Review* 0 : 1- 27

\_\_\_\_\_. 2016. "The Resilience of Monarchised Military in Thailand." dalam *Journal of Contemporary Asia*, Special Issue 46 : 425 - 444.

Connors, Michael. K., and Kevin, Hewison. 2008. "Introduction: Thailand and the 'good coup'". *Journal of Contemporary Asia* 38 : 1-10

Hewison, Kevin. 2010. "Considerations on inequality and politics in Thailand". *Democratization* 21: 846-866.

Kongkirati, Prajak. 2016. "Thailand's Failed 2014 Election: The Anti-Election Movement, Violence and Democratic Breakdown." *Journal of Contemporary Asia* 46 : 476-485

Kongkirati, Prajak & Kanchoochat, Veerayooth. 2018. "The Prayuth Regime: Embedded Military and Hiearchical Capitalism" dalam Thailand. *TRaNS: Trans-regional and National Studies of Southeast Asia* 6 : 279-305

McCargo, Duncan. 2005. "Network monarchy and legitimacy crises in Thailand". *The Pacific Review*. 18 : 499-519

\_\_\_\_\_. 2015b. "Thailand in 2014: The Trouble with Magic Swords." *Southeast Asian Affairs* 2015 1: 335-358.

\_\_\_\_\_. 2019. "Anatomy: Future Backward". *Contemporary Southeast*

*Asia*. Vol.41 (2): 153-162

Melucci, Alberto. 1988. "Getting involved: Identity and mobilization in social movements". *International Social Movement Research*. 1: 329-348

Nethipo, Viengrat. 2021. "Central-Local Relations in Thailand since 2014: Decentralisation, Interrupted, Central Bureaucratic Control Reinforced". *Policy Briefing-SEARB* : 1 - 17

Oo, Zar. Chi. 2014. "Leadership in Southeast Asia Studies: Field Marshal Sarit Thanarat (1908-1963)". *Jhons Hopkins International Centre Of Excellence, University of Yangon*

Pathmanand, Ukrist. 2008. A Different Coup d'Etat. *Journal of Contemporary Asia*. 38

Phoborisut, Penchan. 2019. "Contesting Big Brother: Joshua Wong, Protest, and the Student Network or Resistance in Thailand", *International Journal of Communication* 13 : 3270 - 3292

Phongpaichit, Phasuk & Baker, Chris. 2008. "Thaksin's populism". *Journal of Contemporary Asia* 38 : 62-83.

Siwach, S., Marks S., C., & Autthapon, M. 2018. "Consent, Repression, and Emerging Student Activism in Northeastern Thailand", *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies* 13 (2) : 13 - 27

Sombatpoonsiri, Janjira. 2015. "Securitization of Civil resistance: Thailand's military junta and beyond". *Journal of Resistance Studies Number 2*. 1 : 85 - 126

\_\_\_\_\_. 2017. "The 2014 Military Coup in Thailand: Implications for Political Conflicts and Resolution". *Asian Journal of Peacebuilding*. 5 : 131 - 154

\_\_\_\_\_. 2021. "From Repression to Revolt: Thailand's 2020 Protest and

The Regional Implications". *Giga Focus Asia*.1: 1 - 12

Sripokangkul, Siwath, dkk. 2019. "Consent, Repression, and Emerging Student Activism in Northeastern Thailand". *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies* 13 : 13-27

Uchane C. 2010. "The origin of Red Shirts as counter-movement (กำเนิดเสื้อแดงในฐานะกระบวนกรโต้กลับ)". *Fah Diew Kan* 9 : 90-106

Waiwitlikhit, Pongsapak. 2020. "The Next Generation?: a Comparison Between Thailand's 1973 Protest and Thailand's 2020 Protest". *International Journal of Humanities and Social Science* 10: 16 – 25

### Thesis & Disertasi

Serireongrith, Prutirat Rattanakul. 1983. "The 1932 Coup in Thailand: An Account of a Participant in the Coup". Master's Theses, Western Michigan University

Vijayat Isarapakdi. 1989. "The Man in Khaki – Debaser or Developer? The Thai Military in Politics, with Particular Reference to the 1976–1986 Period." PhD Diss., Tufts University.

### Publikasi Daring

Aljazeera. 2016. "Thailand referendum: New Constitution wins approval". Dalam <https://www.aljazeera.com/news/2016/8/7/thailand-referendum-new-constitution-wins-approval> [Diakses pada 28 Juli 2022]

Associated Press. 2014. "Thailand's coup leader outlines policies". Daily Mail. Dalam <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2753290/Thailands->

[coupleader-outlines-policies.html](http://coupleader-outlines-policies.html). [Diakses pada 27 Juni 2022]

\_\_\_\_\_. 2019. "Who will be Thailand's next Prime Minister?". The Diplomat. Diakses pada 8 Juli 2022 <https://thediplomat.com/2019/03/who-will-be-thailands-next-prime-minister/> [Diakses pada 27 Juni]

Audjarint, Wasamon. 2015. "Government to Rebrand Populism". The Nation. Dalam <http://www.nationmultimedia.com/politics/Govt-to-rebrand-populism-30271153.html>. [Diakses pada 27 Juni 2022]

Bangkok Post. 2013. "Suthep declares 'people's revolt'". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/382361/suthep-declares-people-revolt> [Diakses pada 14 Juni 2022]

\_\_\_\_\_. 2014. "Court Rules on PM's fate". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/408457> [Diakses pada 18 Februari 2022]

\_\_\_\_\_. 2014. "Army Chief Hints Crisis End on Way". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/397584/army-chief-hints-crisis-end-on-way> [Diakses pada 1 Juli 2022]

\_\_\_\_\_. 2014. "Imprisoned in their Palace". Dalam <http://www.bangkokpost.com/lite/crimes/396369/imprisoned-in-their-palace>. [Diakses pada 27 Juni 2022]

\_\_\_\_\_. 2014. "Orders 1, 2: Army Takes over CAPO". Dalam <http://www.bangkokpost.com/archive/orders-1-2-army-takes-over-capo/410731>. [Diakses pada 27 Juni 2022]

\_\_\_\_\_. 2014. "Superboard to run state enterprises". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thaila>

- [nd/politics/417684/state-enterprises-policy-commission-appointed-by-ncpo](#) [Diakses pada 30 Juni 2022]
- \_\_\_\_\_. 2015. "Activists urge end to military court trials". Dalam <http://www.bangkokpost.com/news/politics/688712/activists-urge-end-to-military-courttrials>. [Diakses pada 28 Juni 2022]
- \_\_\_\_\_. 2017. "Thong Fah scheme under fresh attack". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1339139/thong-fah-scheme-under-fresh-attack> [Diakses pada 30 Juni 2022]
- \_\_\_\_\_. 2018. "Watchdog demands govt stop meddling with EC". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1578186/watchdog-demands-govt-stop-meddling-with-ec> [Diakses pada 8 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 2019. "Constitutional Court disbands Thai Raksa Chart". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1640796/constitutional-court-disbands-thai-raksa-chart> [Diakses pada 6 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 2019. "Court suspends Thanathorn from MP". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1682696/court-suspends-thanathorn-from-mp> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 2020. "Future Forward dissolved". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1862849/future-forward-dissolved> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 2020. "Free People Group Stresses Three Demands, Unveils Dream". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1967087/free-people-group-stresses-three-demands-unveils-dream> [Diakses pada 9 November 2021]
- Bangprapa, M. 2019. "EC: Feb 24 now impossible". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1608898/ec-feb-24-now-impossible> [Diakses pada 7 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 2019. "EC refuses to set date unless government moves first". Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1605514/ec-to-government-your-move> [Diakses pada 7 Juli 2022]
- Bangkokbiz News. 2014. "PDRC proposes section 3 and 7 to avoid civil war". Dalam <http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/576737> [Diakses pada 14 Juni 2022]
- \_\_\_\_\_. 2020. "'Youth liberation' opens a full statement of demands ('เยาวชนปลดแอก' เปิดแถลงการณ์ข้อเรียกร้องฉบับเต็ม)". Dalam <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890036> [Diakses pada 19 Juli 2022]
- Bangkok Pundit. 2016. "The effects of Thailand's proposed electoral system". Dalam <https://web.archive.org/web/20190605025006/https://asiancorrespondent.com/2016/02/the-effects-of-thailands-proposed-electoral-system/> [Diakses pada 7 Juli 2022]
- BBC.com. 2019. "Princess Ubolratana: Thai royal to stand as PM candidate". Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-47167378> [Diakses pada 20 Maret 2022]
- Calamur, Krishnadev. 2013. "Thai Prime Minister Dissolves Parliament, Calls New Elections". Dalam <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2013/12/09/249729649/thai-prime-minister-dissolves-parliament->

- [calls-new-elections](#) [Diakses pada 18 Februari 2022]
- Charuvastra, Teeranai. 2014. *Prayuth Chan-Ocha: army chief, junta leader, prime minister*. Dalam <https://www.khaosodenglish.com/politics/2014/08/21/1408603301/> [Diakses pada 4 Juli 2022]
- Coconut Bangkok. 2020. Anti-Government Rallies Spreading Across Thailand. Dalam <https://coconuts.co/bangkok/news/anti-government-rallies-spreading-across-thailand/> [Diakses pada 19 Juli 2022]
- DW. 2016. "Thailand unveils new constitution draft to public". Dalam <http://www.dw.com/en/thailand-unveils-new-constitution-draft-to-public/a-19147871> [Diakses pada 29 Juni 2022]
- \_\_\_\_\_. 2019. Thai parliament elects Prayuth Chan-O-Cha as prime minister. Dalam <https://www.dw.com/en/thai-parliament-elects-prayuth-chan-ocha-as-prime-minister/a-49071811> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- Ellis-Petersen, H. 2019. "Thailand's military-backed PM voted in after junta creates loose coalition". The Guardian. Dalam <https://www.theguardian.com/world/2019/jun/05/thailand-military-backed-pm-prayuth-chan-ocha-voted-in-after-junta-creates-loose-coalition> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- Faris, Yothasamuth. 2011. "What is Salim? Origin, context, meaning and characteristics." Prachatai. Dalam <http://prachatai.com/journal/2011/1/1/37957> [Diakses pada 14 Juni 2022]
- Goldberg dkk. 2021. What Happened to Wanchalearm?. Dalam <https://prachatai.com/english/node/9273> [Diakses pada 18 Juli 2022]
- Grichawat, Lowatcharin. 2014. "Along Came the Junta: The Evolution and Stagnation of Thailand's Local Governance". Dalam <http://kyotoreview.org/yav/along-came-the-junta-the-evolution-and-stagnation-of-thailandslocal-governance/> [Diakses pada 1 Juli 2022]
- Gunia, A. 2020. "Thailand's future forward party has the support of young thais. A court could disband it entirely". Dalam <https://time.com/5756668/thailand-future-forward-party/> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- Head, Jonathan. 2016. "Thai Referendum: Why Thais backed a militart-backed constitution". BBC.com. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-37013950> [Diakses pada 16 Februari 2022]
- Hicken, Allen & Bangkok Pundit. 2019. "Thailand's New Electoral System". Dalam <https://www.thaidatapoints.com/post/thai-election-pending-5> [Diakses pada 6 Juli 2022]
- Human Rights Watch. 2020. "Human Rights Dimensions of Covid-19 Response". Dalam <https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response#Toc35446579> [Diakses pada 18 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 27 Mei 2022. Thailand: State of Emergency Extension Unjustified. Dalam <https://www.hrw.org/news/2020/05/27/thailand-state-emergency-extension-unjustified> [Diakses pada 18 Juli 2022]
- ILAW (report). 2015. "364 days after the coup: Report on the Situation of freedom of expression in Thailand". Dalam <https://freedom.ilaw.or.th/en/reportt-haicoup2014/364-days-after-coup-report-situation-freedom-expression-thailand> [Diakses pada 18 Februari

- 2022]
- \_\_\_\_\_. (2022). "Sort out the "no gatherings" requirement under the emergency decree (ไล่เรียง ข้อกำหนด "ห้ามชุมนุม" ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน)". Dalam <https://ilaw.or.th/node/6101> [Diakses pada 17 Juli 2022]
- INN News. 2014a. "Erawan Centre offers figures of deaths and injuries during the PDRC protests". Dalam <http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=540453> [Diakses pada 14 Juni 2022]
- [Jarernpanit, Thannapat](http://www.jarernpanit.com). 2019. "The Free People Movements and Political Awakening in Thailand". Dalam <https://www.asiaglobalonline.hku.hk/free-people-movements-and-political-awakening-thailand> [Diakses pada 9 November 2021]
- Kamuansilp, P & Draper, Joseph. 2016. "Thai Hopes for Decentralisation Fade". Dalam <http://cola.kku.ac.th/main/page.php?id=177?&lang=en>. [Diakses pada 1 Juli 2022]
- Kendall, Dave. 2019. "Explainer: New rules for the House of Representatives". Bangkok Post. Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1605898/explainer-new-rules-for-the-house-of-representatives> [Diakses pada 7 Juli 2022]
- Khidhir, Sheith. 2020. "Is Thailand a flawed democracy?". Dalam <https://theaseanpost.com/article/thailand-flawed-democracy> [Diakses pada 19 Juli 2022]
- Kurlantzick, Joshua. 2020. A Popular Thai opposition party was disbanded. What Happens Next?. Dalam <https://www.cfr.org/in-brief/thailand-future-forward-party-disbanded-thanathorn-protest> [Diakses pada 15 Juli 2022]
- Lawyers Rights Watch Canada. 2015. "Thailand: Trials of Civilians in Military Courts Violate International Fair Trials: Judicial Harassment of Lawyers and Human Rights Defenders/ Statement". Dalam <http://www.lrwc.org/thailand-trials-of-civilians-in-military-courts-violate-international-fair-trial-rights-statement/> [Diakses pada 28 Juni 2022]
- Maneechote, Pear & Chia, D. Jasmine. 2020. "Thai Elites are resistant to change because they've benefited from the status quo". Dalam <https://www.thaienquirer.com/19912/thai-elites-are-resistant-to-change-because-theyve-benefited-from-the-status-quo/> [Diakses pada 14 Maret 2022]
- Manushya Foundation. 2020. "The Free Youth Movement in Thailand - Interview with Tattep Ruangprapaikitseree "Ford"". Dalam <https://www.manushyafoundation.org/post/the-free-youth-movement-in-thailand-interview-with-tattep-ruangprapaikitseree-ford> [Diakses pada 10 Mei 2022]
- MCOT. 2014. HM the King Endorses Provisional Constitution. Dalam <http://www.pattayamail.com/thailandnews/hm-the-king-endorses-provisional-constitution-39743>. [Diakses pada 27 Juni 2022]
- Matichon. 2014. "Background of coup during the meeting [ เพี้ยเบื้องหลังระทึกยตี อา นางจ]" (*in Thai*). Dalam <http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1400823069>. [Diakses pada 27 Juni 2022]
- Mgr Online. 2020. "Rotten political whirlpool light a mob #youth liberated into the street, insisting not to 'fall down". Dalam <https://mgronline.com/daily/detail/9>

- [630000076218](#) [Diakses pada 19 Juli 2022]
- Montesano, Michael. J. 2014. "What is to come in Thailand". ISEAS Perspective 2014 (7), February 10. Dalam [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2014\\_07.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2014_07.pdf) [Diakses pada 14 Juni 2022]
- Nation TV. 2014. "Prayuth Says to AFP Journalist He's Worried About the Civil War' (ประยุทธ์เปิดใจ AFP หัวน้สงครวมกลางเมือง)". Dalam <http://www.nationtv.tv/main/content/politics/378396661/> [Diakses pada 18 Februari 2022]
- Phoonphongphiphat & Yuda. 2020. "Thailand protesters take 'a break' with key demands unmet". Nikkei Asia. Dalam <https://asia.nikkei.com/Politics/Turbulent-Thailand/Thailand-protesters-take-a-break-with-key-demands-unmet> [Diakses pada 19 Juli 2022]
- Post Today. 2014. "Man of the State' Submitted a Petition to the Army Chief". Dalam Diakses pada 14 Juni 2022 <http://www.posttoday.com/การเมือง/294243/คณะรัฐบุคคลวงตัวแทนยื่นหนังสือต่อผ.เหล่าทัพ> \_
- Prachatai English. 2020. "[Full Statement] The demonstration a Thammasat proposes monarch reform. Dalam <https://prachatai.com/english/node/8709> [Diakses pada 19 Juli 2022]
- Reuters. 2015. "Royal Critics in Thailand Get Record Sentences". Chicago Sun-times. Dalam <http://chicago.suntimes.com/nationworld/7/71/934863/royal-critics-in-thailandget-record-prison-sentences>. [Diakses pada 28 Juni 2022]
- Rojanaphruk, Pravit. 2008. "Army Comeback through Soft, Silent Coup". The Nation. Dalam [www.nationmultimedia.com](http://www.nationmultimedia.com) [Diakses pada 18 Februari 2022]
- \_\_\_\_\_. 2018. "Parties fume over new 'gerrymandered' electoral map". Dalam <https://www.khaosodenglish.com/politics/2018/11/30/parties-fume-over-gerrymandered-electoral-map/> [Diakses pada 8 Juli 2022]
- \_\_\_\_\_. 2019. "Doubts over election commission's party list allocations grow". Dalam <https://www.khaosodenglish.com/politics/2019/04/08/doubts-over-election-commissions-party-list-allocations-grow/> [Diakses pada 13 Juli 2022]
- Sattaburuth, Aekarach & Bangprapa, M. 2019. "Pheu Thai govt hope on ropes". Bangkok Post. Dalam <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1674208/pheu-thai-govt-hope-on-ropes> [Diakses pada 13 Juli 2022]
- Saxer, Martin. 2014b. "The Middle Classes in the Vertigo of Change". Social Europe. Dalam <https://www.socialeurope.eu/2014/08/vertigo-of-change/> [Diakses pada 14 Juni 2022]
- Setyarini, Luky. 2011. "Baju Merah Thailand Dukung Partai Puea Thai". Dalam <https://www.dw.com/id/baju-merah-thailand-dukung-partai-puea-thai/a-15149333> [Diakses pada 18 Februari 2022]
- Sirithamphaiboon, Rungrawee. 2020. "Sticky Point- Not Sticky: What hashtags and student protest tell us? (จุดติด-ไม่ติด:แฮชแท็กและการชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาบอกอะไรเราบ้าง)". Dalam <https://themomentum.co/students-protest-after-after-future-forward->

- [party-disbanded/](#) [Diakses pada 16 Juli 2022]
- Tat News. 2020. "TAT update: Thailand invokes emergency decree from 26 March to 30 April, 2020 to combat COVID-19". Dalam <https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-thailand-invokes-emergency-decree-from-26-march-to-30-april-2020-to-combat-covid-19/> [Diakses pada 17 Juli 2022]
- Taylor, A. 2014. "The Five-Step Guide to a Thai Military Coup". Washington Post. Dalam <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/05/22/the-5-step-guideto-a-thai-military-coup/>. [Diakses pada 27 Juni 2022]
- Thairath.co. 2020. "4 universities in Korat, students, people show their power to reclaim democracy (4 มหาวิทยาลัยในโคราช นักเรียนประชาชน แสดงพลังทวงคืนประชาธิปไตย)". Dalam <https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1896816> [Diakses pada 18 Juli 2022]
- Thai Pbs World. 2020. Thailand placed 4<sup>th</sup> in Asean on the democracy Index 2020. Dalam <https://www.thaipbsworld.com/thailand-and-placed-4th-in-asean-on-the-democracy-index-2020/> [Diakses pada 19 Juli 2022]
- The Bangkok Insight. 2020. "Protesting the stars spread in more than 20 provinces. Open the timeline starting from 'Youth Liberation'". Dalam <https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/400818/> [diakses pada 19 Juli 2022]
- Thongnoi, J. 2014. Fall into Line, Youngsters. Diakses pada 18 Februari 2022 <https://t1p.de/iaiz>
- Wright, George & Praithongyaem, Issariya. 2020. "Wanchalearm Satsaksit: The Thai satirist abducted in broad daylight". Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-53212932> [Diakses pada 18 Juli 2022]
- Yuthakorn, Witthaya. 2014 . Be Careful What You Wish For,"The Rhetoric and the Reality of the Thai Coup. Dalam <http://www.prachatai.com/english/node/4095>. [Diakses pada 27 Juni 2022].

### Undang-Undang & Konstitusi Thailand

Royal Thai Government. 1914. *Martial Law Act* Tautan: [www.thailawforum.com/laws/Martial%20Law.pdf](http://www.thailawforum.com/laws/Martial%20Law.pdf).

\_\_\_\_\_. 2014. *Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim)*. Tautan: [asean-law.senate.go.th/files/Thailand 2014.pdf](http://asean-law.senate.go.th/files/Thailand%2014.pdf)

Constitute project.org. 2022. *Thailand's Constitution of 2017*. Tautan: [https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand 2017.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand%202017.pdf?lang=en)